



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2019



Samarinda, Pebruari 2020

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang telah disinergiskan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara lebih baik.

Samarinda, Pebruari 2020

Plt KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



H. HAFIDZ LAHIYA, S.E, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19620910 199103 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No,mor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil Capaian Kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis I | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % |
| Persentase Pergerakan Sarana Transportasi | 30% | 31.55% | 105.1% |

| Sasaran Strategis II | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % |
| Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan | 50% | 50.49% | 100.98% |

Dapat diketahui bahwa masing-masing capaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Tahun 2018-2023, hal tersebut perlu ada komitmen pimpinan dalam mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Dasar Pembentukan Organisasi | 1 |
| 1.2. Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| 1.3. Struktur Organisasi | 3 |
| 1.4. Sumber Daya Manusia | 4 |
| 1.5 Aspek Strategis Organisasi | 9 |
| 1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis) | 12 |
| 1.7 Sarana dan Prasarana Kerja | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| 2.1 Pencanaan Strategis | 18 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama Dishub Prov Kaltim | 29 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun | 31 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 39 |
| 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya 2018 | 39 |
| 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi | 43 |
| 3.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 | 44 |
| 3.4 Realisasi Anggaran | 62 |
| BAB IV PENUTUP | 65 |
| 4.1 Kesimpulan | 65 |
| 4.2 Kesimpulan | 66 |

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah. Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah (SDAP)
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2010 dan Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim.

1.2 Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai dengan Pergub No. 63 Tahun 2016 Dinas Perhubungan mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pergub No. 63 Tahun 2016 pasal 249, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pelayaran;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

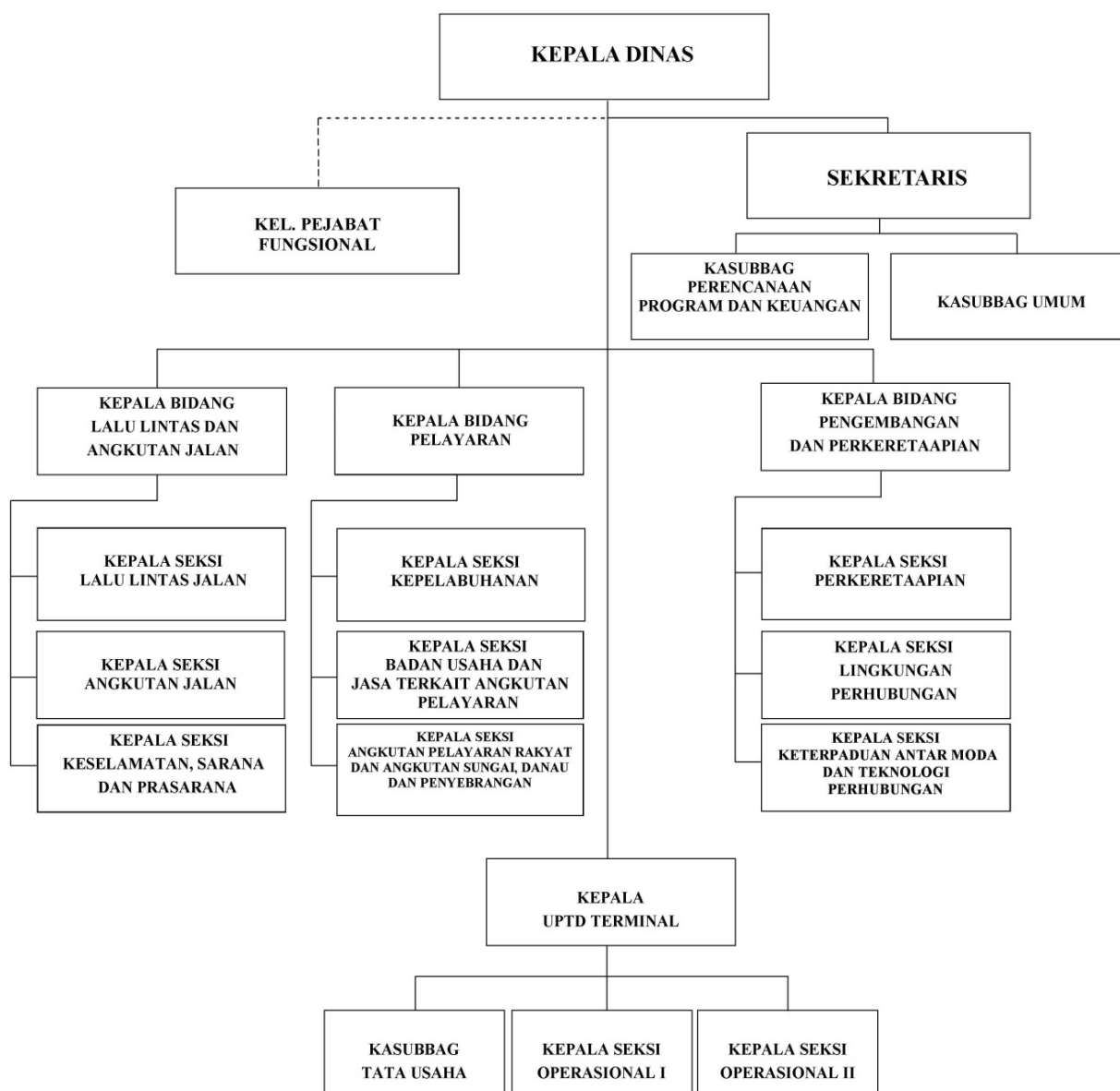
1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik.

Selain itu, dengan adanya struktur organisasi kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Dalam struktur

organisasi terdapat hubungan antar komponen dan posisi yang ada di dalamnya, dan semua komponen tersebut mengalami saling ketergantungan, artinya, masing-masing komponen dalam struktur organisasi akan saling mempengaruhi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada sebuah organisasi secara keseluruhan. Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2019



Sumber: Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

| Jabatan | Jenis Kelamin | | Golongan | | | | Pendidikan | | | | | |
|--|---------------|-----------|----------|-----|----|---|---------------|---------|------|------|------|----|
| | Laki-Laki | Perempuan | IV | III | II | I | Pasca Sarjana | Sarjana | Dipl | SLTA | SLTP | SD |
| Kepala Dinas | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Sekretaris | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kepala Bidang LLAJ | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Kepala Bidang Pelayanan | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kepala UPTD Terminal | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kepala Subbag Umum | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Kepala Subbag Perencanaan Program dan Keuangan | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kasi Lalu Lintas Jalan | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Kasi Angkutan Jalan | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kasi Keselamatan, Sarana dan Prasarana | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Kasi Kepelabuhanan | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kasi Badan Usaha dan Jasa Terkait | - | | | | | | | | | | | |
| Kasi Angkutan Pelayaran dan ASDP | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Kasi Perkeretaapian | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kasi Lingkungan Perhubungan | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Kasi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kasubbag Tata Usaha Terminal | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Kasi Operasional I Terminal | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Kasi Operasional II Terminal | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Subbag Umum | 6 | 6 | | 7 | 5 | | 1 | 3 | | 6 | 2 | |
| Subbag Perencanaan Program dan Keuangan | 8 | 3 | | 8 | 3 | | | 5 | | 6 | | |
| Seksi Lalu Lintas Jalan | 3 | | | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | | |
| Seksi Angkutan Jalan | 2 | 2 | | 3 | 1 | | | 2 | | 2 | | |
| Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | |
| Seksi Kepelabuhanan | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| Seksi Angkutan Pelayaran dan ASDP | 5 | 1 | 1 | 5 | | | 1 | 4 | | 1 | | |
| Seksi Perkeretaapian | 1 | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| Seksi Lingkungan Perhubungan | 2 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | |
| Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan | 3 | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | |
| Pengelola Terminal | 30 | 2 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 | 5 | | 26 | | |
| Jlh PNS | 84 | 17 | 15 | 51 | 34 | 1 | 16 | 34 | 5 | 44 | 2 | - |
| Jlh Honor/PTT | 31 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 24 | 2 | 1 |
| Jlh PNS + Honor/PTT | 115 | 26 | 15 | 51 | 34 | 1 | 16 | 45 | 7 | 68 | 4 | 1 |

Sumber : Sub Bag Umum Sekretariat Dishub Kaltim Tahun 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki jumlah Sumber Daya Aparatur sebanyak 101 orang Pegawai Negeri Sipil dan 40 orang Pegawai Tidak Tetap (Outsourcing).

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah | |
|----|------------------------|------------|----|
| | | L | P |
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | - | - |
| 2 | SLTP | 2 | - |
| 3 | SLTA | 41 | 7 |
| 4 | Sarjana Muda (D-III) | 3 | - |
| 5 | Sarjana (S1/D-IV) | 25 | 9 |
| 6 | Pasca Sarjana (S-2) | 13 | 1 |
| 7 | Doktor (S-3) | - | - |
| | Jumlah | 84 | 17 |
| | TOTAL | 101 | |

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

| No | Pangkat dan Golongan | Jumlah | |
|----|--------------------------|------------|----|
| | | L | P |
| 1 | I/a Juru Muda | - | - |
| 2 | I/b Juru Muda Tk. I | - | - |
| 3 | I/c Juru | - | - |
| 4 | I/d Juru Tk. I | 1 | - |
| 5 | II/a Pengatur Muda | 2 | - |
| 6 | II/b Pengatur Muda Tk. I | 6 | - |
| 7 | II/c Pengatur | 21 | 2 |
| 8 | II/d Pengatur Tk. I | 4 | - |
| 9 | III/a Penata Muda | 4 | 2 |
| 10 | III/b Penata Muda Tk. I | 7 | 7 |
| 11 | III/c Penata | 7 | 6 |
| 12 | III/d Penata Tk. I | 15 | - |
| 13 | IV/a Pembina | 8 | - |
| 14 | IV/b Pembina Tk. I | 5 | - |
| 15 | IV/c Pembina Utama Muda | - | - |
| 16 | IV/d Pembina Utama Madya | 1 | - |
| | Jumlah | 84 | 17 |
| | TOTAL | 101 | |

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

| No | Struktural dan Fungsional | Jumlah | |
|----|---------------------------|-----------|---|
| | | L | P |
| 1 | Eselon II | 1 | - |
| 2 | Eselon III | 5 | - |
| 3 | Eselon IV | 14 | 3 |
| | Jumlah | 20 | 3 |
| | TOTAL | 24 | |

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019

Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Kontrak Tahun 2019

| No | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah | |
|----|------------------------|-----------|---|
| | | L | P |
| 1 | SD | 1 | - |
| 2 | SMP | 2 | - |
| 3 | SMA | 21 | 3 |
| 4 | D-III | 1 | 1 |
| 5 | S-1 | 7 | 4 |
| | Jumlah | 32 | 8 |
| | TOTAL | 40 | |

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan

| No | Struktural dan Fungsional | Jumlah | |
|----------|--|--------|----|
| | | L | P |
| I | Dinas Perhubungan Prov. Kaltim | 84 | 17 |
| 1 | Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim | 1 | - |
| 2 | Sekretaris | 1 | - |
| a | | 1 | - |
| b | Sub Bagian Perencanaan Program | 1 | - |
| c | Sub Bagian Umum | 1 | - |
| 3 | Sub Bagian Keuangan | 1 | - |
| a | Kepala Bidang Perhubungan LLAJ | 1 | - |
| b | Seksi Lalu Lintas | 1 | - |
| c | Seksi Angkutan Jalan | 1 | - |
| 4 | Seksi Teknik Sarana Prasarana Jalan | 1 | - |
| a | Kepala Bidang Pelayaran | 1 | - |

| | | | |
|---|---|------------|----|
| b | Seksi Kepelabuhan | - | 1 |
| c | Seksi Badan Usaha Dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran | 1 | - |
| 5 | Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan | 1 | - |
| a | Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian | 1 | - |
| b | Seksi Perkeretaapian | 1 | - |
| c | Seksi Lingkungan Perhubungan | 1 | - |
| 6 | Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan | 1 | - |
| | Kepala UPTD Terminal | 1 | - |
| a | Sub Bagian Tata Usaha | 1 | - |
| b | Seksi Operasional I | 1 | - |
| c | Seksi Operasional II | | |
| | Jumlah | 113 | 27 |
| | TOTAL | 101 | |

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Dinas perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan pada hakekatnya memiliki tugas dalam membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan pencapaian visi misinya terutama pada bidang kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan sarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki peran penting dalam menvapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tujuan meningkatkan aksebilas wilayah terutama pada aspek transportasi di Kalimantan Timur.

Dinas Perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan jasa pelayanan transportasi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perhubungan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023, Dinas Perhubungan, secara umum memiliki fungsi strategis dalam pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan tujuan startegis Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Meningkatnya Aksesibilitas wilayah” yang ditunjang dengan arah kebijakan berupa :

1. Meningkatkan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman;
2. Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Dimana hal tersebut diatas di implementasikan dalam program prioritas :

1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan

Selanjutnya Dinas Perhubungan Prov Kaltim melakukan identifikasi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Teknik identifikasi menggunakan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dalam lingkungan internal identifikasi dalam bentuk Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas. Sedangkan dari lingkungan eksternal diidentifikasi dalam bentuk Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang merupakan dorongan dan hambatan kinerja dengan hasil sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya kewenangan pengelolaan sektor perhubungan di daerah;
- b. Adanya dukungan dari berbagai stakeholders transportasi baik instansi vertikal maupun di daerah serta organisasi profesi;
- c. Adanya potensi sumber daya alam serta deregulasi perundang-undangan yang memberikan peluang kepada daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk turut berkiprah dalam dunia transportasi.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas memerlukan peningkatan pengawasan dan pengelolaan yang profesional;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana sehingga belum tergalinya potensi pengelolaan bidang tugas seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan global;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional.

4. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya peluang peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur;
- b. Terdapat minat penanaman modal di daerah yang berhubungan erat dengan dunia usaha transportasi;
- c. Adanya kebijakan Pemerintah dalam penataan dan pengembangan wilayah.

5. Ancaman (*Threats*)

- a. Rendahnya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
- b. Masih rendahnya kedisiplinan dan pemahaman masyarakat pelaku transportasi.

Dengan menggunakan metode SWOT faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada dikelompokkan kedalam 4 strategi yaitu :

- 1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- 2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/kendala
- 3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- 4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dari strategi tersebut diambil faktor-faktor kunci sebagai berikut :

1. Perberdayaan, peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber dana secara optimal;
3. Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang transportasi;
4. Penegakan hukum secara konsisten (taat azas);
5. Peningkatan, koordinasi antar/inter instansi;
6. Peningkatan mutu pelayanan.

1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya . Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi yang akan mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Adapun Permasalahan yang ada pada Bidang-bidang dan UPTD di Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Perhubungan LLAJ, antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan dan lain-lain data menunjukkan angka kecelakaan cukup tinggi namun tingkat fatalitas menurun;
2. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan over loading (ODOL) di jalan;
4. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
5. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Belum optimalnya pelaksanaan program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
7. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;

8. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP.

2. Permasalahan Bidang Pelayaran

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pelayaran, antara lain :

1. Masih adanya pemahaman yang berbeda antara PP No. 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan No. 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan
2. Belum tersusunnya Dokumen Studi Lingkungan di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
3. Belum tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
4. Belum terciptanya pelaporan angkutan laut secara periodik dan berjenjang
5. Belum tersusunnya dokumen administrasi (izin lokasi, izin pembangunan dan izin operasional) terhadap beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
6. Perlunya rasionalisasi luasan DLKR dan DLKP untuk beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
7. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan pelabuhan laut di Kalimantan Timur
8. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan Pelabuhan Khusus dan atau dermaga khusus di Kalimantan Timur
9. Beberapa pelabuhan laut belum dikembangkan sesuai dengan masterplan sehingga berakibat kapasitas pelabuhan laut tidak sebanding dengan aktifitas/permintaan jasa angkutan laut
10. Pelayanan pelabuhan masih konvensional
11. Sempit dan dangkalnya alur pelayaran disebabkan pelabuhan berada di sungai
12. Masih minimnya fasilitas keselamatan pelayaran
13. Kondisi keamanan dan tertib di pelabuhan laut belum optimal karena sarana kapal patroli, kapal navigasi dan kapal pandu jumlahnya terbatas dan umurnya relatif tua
14. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy di kabupaten Kutai Timur yang merupakan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

3. Permasalahan Pengembangan dan Perkeretaapian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, antara lain :

1. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
3. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga sungai, danau dan penyeberangan;
4. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/dermaga SDP di Kaltim;
6. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se Kaltim;
7. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;
8. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

4. Permasalahan UPTD Terminal

1. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
6. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Tipe B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan dan bersertifikat PPNS;
7. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Tipe B di Kalimantan Timur;
8. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Tipe B;

9. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Tipe B;
10. Belum adanya regulasi tentang legalitas asset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi.
11. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat

1.7 Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Tabel 1.7
Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

| No | Jenis/Merk Kendaraan | No. Polisi | Tahun Pembuatan | Kondisi |
|----------|-------------------------|------------|-----------------|---------|
| A | KENDARAAN Roda 4 | | | |
| 1 | Pick up/Ranger | KT 8473 B | 2005 | Baik |
| 2 | Double Cabin/Mitsubishi | KT 8494 B | 2002 | Baik |
| 3 | Minibus/Toyota Kijang | KT 1273 DZ | 2003 | Baik |
| 4 | Minibus/Isuzu TBR | KT 2369 BZ | 2003 | Baik |
| 5 | Minibus/Isuzu Touring | KT 1907 B | 2003 | Baik |
| 6 | Minibus/Isuzu TBR | KT 2401 BZ | 2003 | Baik |
| 7 | Double Cabin/Mitsubishi | KT 1902 B | 2003 | Baik |
| 8 | Minibus/Toyota Kijang | KT 1782 B | 2003 | Baik |
| 9 | Minibus/Toyota Kijang | KT 2408 BZ | 2003 | Baik |
| 10 | Minibus/Ford Everest | KT 1369 BZ | 2004 | Baik |
| 11 | Minibus/toyota avanza | KT 2758 BZ | 2005 | Baik |
| 12 | Minibus/Isuzu MR | KT 9100 B | 2005 | Baik |
| 13 | Minibus/Toyota Avanza | KT 1015 BZ | 2008 | Baik |

| | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|------|------|
| 14 | Minibus/Toyota Avanza | KT 1014 BZ | 2008 | Baik |
| 15 | Bus/Isuzu NHR | KT 9065 B | 2005 | Baik |
| 16 | Minibus/Suzuki APV | KT 1564 BZ | 2010 | Baik |
| 17 | Minibus/Toyota Kijang | KT 2790 BZ | 2003 | Baik |
| 18 | Jeep/Toyota Fortuner | KT 1716 BC | 2011 | Baik |
| 19 | Pick Up/Suzuki Mega Carry Extra | KT. 8879 BZ | 2012 | Baik |
| 20 | Hilux seri V | KT. 8486 BZ | 2019 | Baik |
| B | KENDARAAN Roda 2 | | | |
| 1 | Sepeda motor/Yamaha 5 LM | KT 5730 B | 2002 | Baik |
| 2 | Sepeda Motor/Honda NF 100 D | KT 4759 M | 2003 | Baik |
| 3 | Sepeda Motor/Honda NF 125 D | KT 4102 MZ | 2005 | Baik |
| 4 | Sepeda Motor/Honda NF 125 TD | KT 4698 MZ | 2008 | Baik |
| 5 | Sepeda Motor/Honda NF 125 TD | KT 4699 MZ | 2008 | Baik |
| 6 | Sepeda Motor/HondaGL 160 D | KT 4819 MZ | 2009 | Baik |
| 7 | Sepeda Motor/Honda NC11B1C | KT 4818 MZ | 2009 | Baik |
| 8 | Sepeda Motor/Honda NF 125 TR | KT 3938 B | 2010 | Baik |
| 9 | Sepeda Motor/Honda NF 125 TR | KT 3935 B | 2010 | Baik |
| 10 | Sepeda Motor/Honda NF 125 TR | KT 3932 B | 2010 | Baik |
| 11 | Sepeda Motor/Honda GLP III | KT 4012 MZ | 2004 | Baik |
| 12 | Sepeda Motor/Honda NF 125 TR | KT 3252 M | 2011 | Baik |
| 13 | Sepeda Motor/Honda NF 125 RR | KT 3245 M | 2011 | Baik |
| 14 | Sepeda Motor/Honda NF 100 TD | KT 4286 M | 2002 | Baik |
| 15 | Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1 | KT 3429 MZ | 2012 | Baik |
| 16 | Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1 | KT 3430 MZ | 2012 | Baik |
| 17 | Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1 | KT 3431 MZ | 2012 | Baik |
| 18 | Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1 | KT 3432 MZ | 2012 | Baik |

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Prov Kaltim berjumlah 20 kendaran roda empat dan 18 kendaraan roda dua kendaraan dan dalam keadaan baik.

Tabel. 1.8
Luas Bangunan Dan Sarana Prasarana Penunjang Dinas Perhubungan Prov Kaltim
2019

| N0 | Uraian | Luas Bangunan (M ²) | Jumlah | Luas Keseluruhan (M ²) |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1 | Bangunan Induk | 2,950 | 2 | 5,900 |
| 2 | gedung koperasi | 180 | 1 | 180 |
| 3 | gedung Dharma Wanita | 419 | 1 | 419 |
| 4 | Musholla | 157 | 1 | 157 |
| 5 | Kantin | 32 | 1 | 32 |
| 6 | bangunan baru | 202 | 2 | 404 |
| 7 | Ruang Rapat | | 2 Unit | |
| 8 | Area Parkir | | 2 Ruang | |
| 9 | Komputer | | 75 unit | |
| 10 | Telepon | | 2 Unit | |
| 11 | Webbsite | | 1 Buah | |
| 12 | Papan Pengumuman | | 1 Unit | |
| 13 | Videotron | | 1 Unit | |
| | Luas Bangunan Keseluruhan | | | 7.092 M ² |

Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 M².

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga dapat diartikan sebagai gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sektor perhubungan Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

1. VISI

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023 adalah :

“BERANI UNTUK KALTIM YANG BERDAULAT”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- 1) Berdaulat Salam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakghlak Mulia dan Berdaya Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas
- 2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan EWkonomi Kerakyatan yang Berkeadilan
- 3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan
- 4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- 5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesionalitas dan Berorientasi Pelayanan Publik

Dari Beberapa Misi diatas Dinas Perhubunga Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab dan memiliki fokus sasaran pada misi ke-3 (tiga) yaitu **“Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan”**

3. TUJUAN

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 adalah :

- 1) Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah

4. SASARAN

Sasaran penyelenggaraan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan pada peningkatan pemerataan fasilitas pelayanan transportasi secara adil, merata dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi sehingga pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 - 2023, sebagai berikut :

Sasaran-1 :

- Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman

Sasaran-2 :

- Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

5. INDIKATOR KINERJA

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka sasaran sektor perhubungan sesuai RPJMD yaitu *Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah* dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Provinsi Sektor Perhubungan Tahun 2018 – 2023 (RPJMD)

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Capaian Lima Tahunan | | | | | Target Kinerja Akhir RPJMD |
|-----|---|------------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Perhubungan | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Penumpang yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton) | Penumpang (Orang) dan Barang (Ton) | 10.392.536 (orang) dan 325.051.663 (Ton) | 10.705.000 (Orang) dan 3345.805.000 (Ton) | 11.026.150 (Orang) dan 334.850.000 (Ton) | 11.356.200 (Orang) dan 355.200.000 (Ton) | 11.700.000 (Orang) dan 365.900.000 (Ton) | 12.050.000 (Orang) dan 376.900.000 (Ton) | 12.050.000 (Orang) dan 376.900.000 (Ton) |

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2019 - 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Target Capaian Lima Tahunan yang mendukung Visi dan Misi serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Indikator
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

VISI : Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat

MISI : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | CAPAIAN AWAL 2018 | TARGET KINERJA INDIKATOR | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE |
|----|------------------------------------|---|---|--------|-------------------|--------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah | Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman | Persentase Pergerakan Sarana Transportasi | % | 25 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| 2 | | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan | % | 50 | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% |

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dan Indikator Program
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

VISI : Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat

MISI : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM | | | | | KONDISI KERJA AKHIR RPJMD |
|-----|------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah | Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman | Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | Jumlah dan Kapasitas Prasarana Perhubungan Laut dan SDP | 83% | 83% | 85% | 88% | 90% | 90.42% | 90.42% |
| | | | | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah Simpul Transportasi Yang Terintegrasi dan Terpadu | 0 Simpul | 1 Simpul | 2 Simpul | 3 Simpul | 1 Simpul | 0 Simpul | 7 Simpul |
| | | | | Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B | Jumlah Penumpang Terminal Yang Terlayani | 500.000 Orang | 650.000 Orang | 700.000 Orang | 750.000 Orang | 800.000 Orang | 1000.000 Orang | 1.000.000 Orang |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 2 | | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas | 854 | 683 | 598 | 512 | 427 | 342 | 342 |
| | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit Kerja Perangkat Daerah memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (unit) | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit |
| | | | | Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase ASN yang memiliki estandar kompetensi (%) | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | 50% |
| | | | | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 67 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 |

Sumber : Renstra Dishub Kaltim 2019-2023

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Program Dan kegiatan
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA KEGIATAN | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah | Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman | Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | Jumlah dan Kapasitas Prasarana Perhubungan Laut dan SDP | Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan | Jumlah dan progres pelabuhan/ dermaga yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 1 Unit |
| | | | | | | Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat | Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelaikan berlayar | 80 % | 81.5 % | 85% | 91% | 95% |
| | | | | | | Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran | Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah Simpul Transportasi Yang Terintegrasi dan Terpadu | Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perekeretaapian | Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan | 1 Simpul | 2 Simpul | 3 Simpul | 1 Simpul | 0 Simpul |
| | | | | | | Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan | 1 Perencanaan | 2 Perencanaan | 2 Perencanaan | 3 Perencanaan | 2 Perencanaan |
| | | | | | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda | Jumlah perencanaan angkutan pemadu moda | 3 Perencanaan | 2 Perencanaan | 2 Perencanaan | 2 Perencanaan | 2 Perencanaan |
| | | | | Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B | Jumlah Penumpang Terminal Yang Terlayani | Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I | Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan | 2 Terminal | 1 Terminal | 1 Terminal | 1 Terminal | 0 Terminal |
| | | | | | | Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II | Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi darat | Pertumbuhan Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Jumlah Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus) | Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan | Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan | 120 Km | 120 Km | 120 Km | 120 Km | 120 Km |
| | | | | | | Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan | Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina | 24 Badan Usaha | 24 Badan Usaha | 24 Badan Usaha | 24 Badan Usaha | 24 Badan Usaha |
| | | | | | | Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan | Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi | 42.5 % | 50 % | 55% | 65% | 72.5% |
| | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |
| | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Kinerja Tepat Waktu | Persentase Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Pengadaan Kelengkapan dan Perlengkapan Kantor yang laik | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Persentase Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor (%) | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Persentase ASN Yang memiliki estándar kompetensi (%) | Kordinasi dan Konsultasi Lembaga | Jumlaha Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% |
| | | | | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah | Nilai Kinerja Perangkat Daerah PD | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Terselenggara nya pertanggungja waban pengadministrasian anggaran | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok | 5 Dok |
| | | | | | | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan | 20 Dok | 20 Dok | 20 Dok | 20 Dok | 20 Dok |

Sumber Renstra Dishub 2019-2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov kaltim adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2019-2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN) | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|--------|---|--|---------------------|----------------------------|
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman | 1. Prosentase Pergerakan Angkutan Darat, Laut dan Udara | % | Mengukur Prosentase Pergerakan Angkutan Darat, Laut dan Udara yang beroperasi di Kalimantan Timur | $F(X) = \frac{\Delta(\sum \text{Sarana Perhubungan}) \text{ Tahun- } (n-1)}{\sum \text{Sarana Perhubungan Thn } (n-1)} \times 100\%$ | Bidang Pelayaran | Kepala Bidang Pelayaran |
| | | | | | | Bidang Pengembangan | Kepala Bidang Pengembangan |
| | | | | | | UPTD Terminal | Kepala UPTD Terminal |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi darat | 2. Prosentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLAJ | % | Mengukur Prosentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLJ di Kalimantan Timur | $F(X) = \frac{\Delta(\sum \text{Sarana Prasarana LLJ}) \text{ Tahun- } (n-1)}{\sum \text{Sarana Prasarana LLJ Thn } (n-1)} \times 100\%$ | Bidang LLAJ | Kepala Bidang LLAJ |

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Renstra telah ditetapkan target per tahun pencapaian kinerja hingga lima tahun kedepan dan untuk tahun 2019 telah ditetapkan penetapan kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahun 2019
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksebilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman | Mengukur prosentase pergerakan sarana transportasi darat, laut dan udara | 30% |
| Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi darat | Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan | 50 % |

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2019

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan/tahun anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja di Tahun 2019 pada Perangkat daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Kesuma Bangsa No. 1 (0541) 737267, 739882 Faks (0541) 207033
S A M A R I N D A

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Salman Lumoindong, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2019

Pihak Kedua,
Gubernur Kalimantan Timur

DR. IR. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur

IR. H. SALMAN LUMOINDONG, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19600107 198903 1 007

Tabel 2.7

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Periode Januari 2019/sebelum Revisi

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|---|--------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Keselamatan Dalam Bertransportasi di Darat dan di Perairan Laut dan SDP | 1 | Ketersediaan Sarana Angkutan Perairan yang Berlayar di Perairan daratan yang Laik Layar | % | 100 |
| | | | | | |
| | | 2 | Prosentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLAJ | % | 20 |
| | | 3 | Peningkatan Aksebilitas Antar Moda di Bandara APT Pranoto | Orang | 55000 |
| | | 4 | Prosentase Kepuasan Masyarakat (%) | % | 76,65 |
| | | 5 | Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang berintegritas dan bebas korupsi | Zona | 5 |

| | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|---|------------------|------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 2,894,520,000 | APBD |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana | Rp 2,331,190,000 | APBD |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Rp 2,476,400,000 | APBD |

| | | | |
|---|--|--------------------------|------|
| | Program Penyusunan Dokumen | | |
| 4 | Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah | Rp 710,832,000 | APBD |
| | Program Pengendalian dan | | |
| 5 | Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Rp 4,375,614,000 | APBD |
| | Program Pembangunan | | |
| 6 | Prasarana Transportasi Laut dan SDP | Rp 3,037,846,500 | APBD |
| | Program Pengembangan | | |
| 7 | Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Rp 21,109,330,000 | APBD |
| | Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B | | |
| 8 | | Rp 4,844,714,000 | APBD |
| | | <hr/> | |
| | | Rp 41,780,446,500 | |

Sumber: Sub Bagian Prencanaan Program dan Keu Dishub 2019

Tabel 2.8
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Revisi Juli 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|--|--------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Infrastruktur Perhubungna yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman | 1 | Mengukur prosentase pergerakan sarana transportasi darat, laut dan udara | % | 35 |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | 2 | Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan | % | 50 |

Sumber Sub Bagian Pencanaan Program dan Keu Dishub 2019

| | PROGRAM | ANGGARAN |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 2,894,520,000 |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana | Rp 2,331,190,000 |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Rp 2,476,400,000 |
| 4 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah | Rp 710,832,000 |
| 5 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Rp 4,375,614,000 |
| 6 | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | Rp 3,037,846,500 |
| 7 | Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Rp 21,109,330,000 |
| 8 | Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B | Rp 4,844,714,000 |
| | Jumlah Anggaran APBD | Rp 41,780,446,500 |

1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Perhubungan Prov Kaltim melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 56.324.825.500** -. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi **Rp. 59.459.715.500** ,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp.15.545.899.000-** dan Belanja Langsung **Rp.43.913.836.500,-**. Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp. 36.624.092.366,- (65.02%)** dengan rincian untuk belanja tidak langsung **Rp. 12.916.954.642,- (83.08%)** belanja langsung sebesar **Rp 23.707.137.724,- (53.98%)**.

2 . Target Belanja Dinas Perhubungan

Tabel 2.9
Target Belanja Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2019

| No. | Uraian | Tahun Anggaran 2019 | | |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | % |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | Rp.15.545.899.000 | Rp. 12.916.954.642 | 83.08 |
| 2 | Belanja Langsung | Rp. 43.913.836.500 | Rp. 23.707.137.724 | 53.98 |
| Jumlah | | Rp. 59.459.715.500 | Rp. 36.624.092.366 | 65.02 |

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Perhubungan Prov Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | Persentase | Keterangan |
|----|--|--------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Infrastruktur Perhubungna yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman | Rp. 26.347.808.000 | 44.31% | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP |
| | | | | Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan |
| | | | | Program Pembangunan |

| | | | | |
|---|--|-------------------|--------|--|
| | | | | dan Peningkatan Terminal Tipe B |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | Rp. 4.375.614.000 | 7.35 % | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan |

Sumber: DPA Dishub Prov Kaltim 2019

Tabel 2.9
Pagu Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|---------------------------|------------|
| 1 | Program pelayanan Administrasi perkantoran | Rp 2,894,520,000 | APBD |
| 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Rp. 2,331,190,000 | APBD |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Rp. 2,476,400,000 | APBD |
| 4 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah | Rp. 710,832,000 | APBD |
| 5 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Rp. 4,375,614,000 | APBD |
| 6 | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | Rp. 3,037,846,500 | APBD |
| 7 | Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Rp. 21,109,330,000 | APBD |
| 8 | Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B | Rp. 4,844,714,000 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 43.913.836.500 | APBD |

Sumber : DPA Dishub Prov Kaltim Tahun 2019

Tabel diatas menjelaskan bahwa Pagu Anggaran Belanja langsung sebelum perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 43.913.836.500**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Sebelumnya (2018)

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

| No. | Komponen Yang Nilai | Bobot | Nilai 2017 | Nilai 2018 | Peningkatan/Penurunan Capaian |
|-----|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | 21,95 | 23.05 | + 1.10 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25% | 18,13 | 16.56 | - 1.57 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | 6,80 | 10.70 | + 3.90 |
| 4 | Evaluasi Kinerja | 10% | 5.12 | 4.96 | - 0.16 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20% | 11,92 | 11.95 | + 0.03 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100% | 63.91 | 67.23 | + 3.325 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | B | B | |

Sumber: laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peningkatan sebesar 3.32 dan mendapatkan Kategori B dengan Interpretasi Baik.

2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim Terhadap Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Hasil tindak lanjut Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim menyajikan rekomendasi tindak lanjut dan rencana aksi atas implementasi Sistem AKIP sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut | Rencana Aksi |
|----------|---|---|---|
| I | Perencanaan Kinerja : | | |
| 1. | Dokumen Renstra Agar selaras dengan dokumen RPJMD serta menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan | Dokumen Renstra pada Dinas Perhubungan Prov Kaltim telah dilakukan revisi dan perbaikan sesuai dengan ketentuan dan selaras dengan RPJMD. (revisi Juni 2019) | Pelaksanaan program kerja dan kegiatan mengacu pada renstra, iku dan sasaran indikator yang telah ditetapkan secara berjenjang. |
| 2. | Target Jangka menengah dalam renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan Tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara Periodik | Capaian Renstra telah dilaksanakan monitoring secara berjenjang per Triwulan untuk laporan capaian atau realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung sesuai dengan rekomendasi | Kegiatan coffee morning/ rapat Pejabat Eselon III dan IV serta staf yang dilaksanakan di setiap awal pekan (hari senin) dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas sebagai indikator pembahasan evaluasi kinerja pegawai yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan kedepan dengan mengacu pada renstra serta adanya dokumen rencana aksi per triwulan atas capaian, kendala dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi capaian program dan kegiatan |
| 3. | Dokumen Renstra agar di reviu secara berkala sehingga hasilnya menunjukan kondisi yang lebih baik atau signifikan | Pada Dokumen Renstra telah dilaksanakan di reviu secara berkala dengan memperhatikan capaian-capaian indicator guna menunjang capaian sasaran strategis. | Kordinasi secara berkala terkait penanggung jawab pemangku jabatan (Program dan Kegiatan) |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | |
| 4. | Dokumen Renstra agar di reviu secara berkala sehingga hasilnya menunjukan kondisi yang lebih baik atau signifikan | Pada Dokumen Renstra telah dilaksanakan di reviu secara berkala dengan memperhatikan capaian-capaian indicator guna menunjang capaian sasaran strategis. | Kordinasi secara berkala terkait penanggung jawab pemangku jabatan (Program dan Kegiatan) |
| 5. | Rencana Aksi atas kinerja mencantumkan target secara periodik (pertriwulan) atas kinerja yang telah dilaksanakan | Dinas Perhubungan Prov Kaltim telah membuat dokumen capaian kegiatan / Program atas rencana aksi per-triwulan pada Tahun 2019 | Dokumen capaian program/ Kegiatan yang menunjang capaian sasaran strategis secara berkala (per Triwulan) |
| 6. | Target Kinerja yang diperjanjikan agar dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan. | Dokumen capaian hasil realisasi Program/Kegiatan mencatumkan hasil capaiannya per program dan kegiatan secara berkala (per-triwulan) | Reward dan Punishment terkait capaian program dan kegiatan sudah dilaksnakan |

| II Pengukuran Kinerja : | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| 1. | Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala minimal triwulan dengan syarat terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai (SOP Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi) | Dokumen capaian atas rencana aksi Dinas Perhubungan Prov Kaltim dikumpul secara berkala per triwulan kepada Biro Organisasi. | Pengumpulan Dokumen atas Rencana Aksi |
| 2. | IKU Supaya sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan IKU agar direviu secara berkala. | IKU Dishub Prov Tahun 2019 Kaltim telah direviu dan terdapat revisi dengan menyesuaikan rencana strategis yang telah ditetapkan | dilakukan secara berkala atau apabila ada perubahan peraturan maupun dokumen acuan lainnya |
| 3. | Target Kinerja Eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya dengan mengacu : 1. Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas 2. Terdapat dokumentasi hasil monitoring 3. Terdapat tindak lanjut hasil monitoring | Melaksanakan Pengukuran hasil capaian kinerja program dan kegiatan pada eselon IV dan III dan melakukan Monitoring Evaluasi Kegiatan per-smester dengan output dokumen | 1. Dokumen hasil capaian atas rencana aksi Pertriwulan 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan per semester |
| 4. | Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward punishment | Hasil pengukuran kinerja berjenjang telah dimanfaatkan sebagai dasar reward dan punishment intern Dishub Prov Kaltim | Evaluasi pimpinan terhadap hasil capaian kerja Eselon III dan Eselon IV |
| 5. | Pengukuran kinerja atas rencana aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | Dokumen capaian atas rencana aksi dan dokumen monitoring evaluasi pembangunan program prioritas menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja | 1. Dokumen hasil capaian atas rencana aksi Pertriwulan 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan per smester |

| III | Pelaporan Kinerja : | | |
|-----|---|--|---|
| 1. | Laporan Kinerja yang dibuat agar menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai: 1. Target vs Realisasi 2. Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya 3. realisasi atau capaian tahun berjalan vs target jangka menengah 4. Realisasi atau capaian tahun berjalan disbanding standar nasional atau RPJN 5. Realisasi instansi disbanding realisasi sejenis atau setra | Laporan kinerja telah menyajikan Target dan capaian realisasi | Dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Telah menyajikan Data target dengan capaian realisasi) |
| 2. | Informasi dkinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan, dengan kriteria datanya valid, dapat ditelusuri kesumber datanya dll | Data dan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja berasal dari pengumpulan data dari masing-masing penanggung jawab program/kegiatan yang dapat ditelusuri dan terverifikasi | Setiap penanggung jawab program dan kegiatan akan dimintai data dan informasi setiap per triwulan untuk diketahui sejauh mana kegiatan itu berjalan |
| 3. | Informasi yang disajikan agar digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi | Informasi yang disajikan (dokumen) telah digunakan untuk meningkatkan realisasi program dan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim | Dokumen Capaian realisasi berjenjang menjadi dasar acuan untuk peningkatan program dan kegiatan berjalan |
| 4. | Informasi yang disajikan agar sepenuhnya digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja serta dijadikan dasar pemberian reward dan punishment | Informasi yang disajikan (dokumen) telah digunakan untuk meningkatkan penilaian kerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> | melaksanakan kegiatan Rapat Pimpinan secara rutin untuk membahas capaian program/kegiatan |

| IV | Evaluasi Internal : | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Agar Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dilakukan minimal triwulan dengan kriteria: 1. terdapat informasi tentang capaian hasil rencana atau agenda 2. terdapat simpulan keberhasilan atau ketidak erhasilan rencana atau agenda 3. terdapat analisi dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan suatu rencana 4. terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana | Monitoring secara berjenjang dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana. Hasil capaian realisasi tertuang dalam doukumen capaian realisasi setiap pertriwulan | Monitoring secara berjenjang dengan melaporkan hasil capaian kinerja sesuai targetmnya untuk dilakukan pengukuran capaian. |
| 2. | 1. Pemantauan rencana aksi agar dilakanakan dalam rangka mengendalikan kinerja serta memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. 2. Hasil evaluasi rencana aksi agar dapat menunjukan perbaikan setiap periode | Renacana aksi telah terpantau sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan dokumen evaluasi rencana aksi menjadi acuan dala perbaikan peningkatan capaian | Memilah setiap program kegiatan dengan indicator kinerja utama dimana setiap program kegiatan harus harus memiliki data bukti kerja seperti dokumentasi, laporan kerja bulanan sampai |

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|
| | 3. Hasil evaluasi rencana aksi harus ditindaklanjuti dalam bentuk langkah – langkah nyata. | program/kegiatan Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. | dengan hasil akhir capaian kerja. |
|--|--|---|-----------------------------------|

| V | Pencapaian Kinerja : | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Capaian Kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya | Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Prov kaltim pada Tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2017 | Memperbaiki dan melengkapi Hasil Evaluasi Sakip Tahun sebelumnya |
| 2 | Informasi mengenai kinerja agar dapat diandalkan | Informasi mengenai hasil dan capaian kinerja dapat diandalkan | Data pendukung capaian kinerja bersumber dari masing-masing penanggung jawab program dan kegiatan dan diinput secara berkala |

Sumber : Subbag. Perencanaan program dan keuangan 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa rekomendasi terhadap permasalahan yang ada telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik dari Tahun sebelumnya.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun target dan capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019

| No | Sasaran Startegis 1 | Indikator Kinerja | Satuan | Data Awal 2018 | Target Tahun (2019) | Triwulan | Target | Realisasi | % |
|----|---|---|--------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksebilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman | Persentase Pergerakan Sarana Transportasi | % | 25% (327.459) | 30% (343.900) | Triwulan I | 7.47% (85.669) | 7.62% (87.322) | 101.93 |
| | | | | | | Triwulan II | 7.52% (86.170) | 7.67% (87.923) | 102.03 |
| | | | | | | Triwulan III | 7.47% (85.574) | 7.61% (87.208) | 101.91 |
| | | | | | | Triwulan IV | 7.54 (86.487) | 7.57 (86.768) | 100.32 |
| | | | | | | Capaian sasaran | 30 % | 31.55 | 105.1% |

| No | Sasaran Startegis 2 | Indikator Kinerja | Satuan | Data Awal 2018 | Target Tahunan (2019) | Triwulan | Target | Realisasi | % |
|----|--|---|--------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | Pertumbuhan Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan | % | 50 % | 50% | Triwulan I | | | |
| | | | | | | Triwulan II | | | |
| | | | | | | Triwulan III | | | |
| | | | | | | Triwulan IV | | | |
| | | | | | | Capaian Sasaran | 50 % | 50.49 | 100.98% |

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2019

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi atas capaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 mencapai target yang telah telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis 2018-2023.

1. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Akseibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman:

Indikator sasaran Strategis 1 (satu):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Realisasi capaian :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Persentase Pergerakan Sarana Transportasi | Persentase (%) | 30 | 31.55 % | 105.1 % |

Pergerakan sarana transportasi yang ada pada wilayah Kalimantan Timur Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, baik transportasi darat, laut maupun udara hal ini dikarenakan selaras naiknya tingkat kebutuhan masyarakat pada sektor transportasi yang menunjang beberapa aspek sesuai kebutuhannya. Hal demikian dapat dilihat dari realisasi capaian persentase pergerakan sarana transportasi yang melebihi target capaian yang ditetapkan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2017 :

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembanding dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) Tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2017, 2018 dan 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | % Penurunan/Peningkatan Tahun 2019 |
|-----|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5/5x100%) |
| 1 | Persentase Pergerakan Sarana Transportasi | % | 20% | 25% | 31.55 % | 26.2% |

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2019

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase pergerakan sarana transportasi mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dalam hal ini telah beroperasinya Bandar Udara Apt. Pranoto di kota samarinda yang telah diresmikan di akhir Tahun 2018.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

Tabel 3.6
Realisasi Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Akhir Renstra

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir RPJMD/RENSTRA | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $6=5/4*100$ |
| 1 | Persentase Pergerakan Sarana Transportasi | % | 50 % | 31.55 % | 63.1 % |

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2019

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 1 memiliki hasil capaian realisasi melebihi target yang ditentukan dalam dokumen Renstra yaitu sebesar 35.76%, hal tersebut dikarenakan meningkatnya pengguna sarana transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Timur.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

1. Sasaran Strategis I (Indikator : Persentase Pergerakan sarana Transportasi :

• Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 1

Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur secara signifikan dapat mempengaruhi tingginya angka kebutuhan masyarakat pada sektor transportasi, karena salah satu fungsi strategis transportasi adalah menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan di Kalimantan Timur, adapun jumlah pergerakan kendaraan (transportasi) Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Pergerakan Kendaraan Tahun 2019

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Pergerakan |
|----|---|-------------------|
| 1 | Terminal Tipe B | 100.917 |
| 2 | Angkutan Udara | 79.730 |
| 3 | Angkutan Laut | 93.522 |
| 4 | Angkutan Penyeberangan Kariangau dan Penajam | 61.656 |
| 5 | Angkutan Dermaga Sungai di Samarinda, Tenggarong, Kubar dan Mahakam Ulu | 13.396 |
| | Jumlah | 349.221 |

Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2019

Dapat diketahui pada tabel diatas bahwa jumlah pergerakan transportasi di Kalimantan Timur Tahun 2019 berjumlah 349.221 kendaraan, dengan demikian capaian tersebut melewati target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Capaian Sasaran Strategis I (Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman) adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan fasilitas Pelabuhan/Dermaga.

Potensi industri maritim di Kaltim memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat pada sektor perikanan, pertanian dan sektor pariwisata. Dengan potensi yang dimiliki Kaltim saat ini harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti peningkatan infrastruktur transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas, menghilangkan pungli di pelabuhan, serta konektivitas sistem transportasi. Tahun 2019 upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam peningkatan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan penyeberangan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Pelabuhan Kariangau
- Pembinaan Badan usaha
- Pemeriksaan Keselamatan Pelayaran
- Sosialisasi dan Forum Keselamatan Pelayaran

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan

Tabel 3.8
Hasil IKLI dan SKM Pada Dinas Perhubungan

| No. | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Tahun 2015 (IKLI) | Tahun 2016 (IKLI) | Tahun 2017 (IKLI) | Tahun 2018 (SKM) | Tahun 2019 (SKM) |
| 1 | 68,54 | 71,16 | 72 | 76,6 | 79.22 |

Sumber : IKLI BAPPEDA Tahun 2017 dan SKM Dishub Kaltim 2019

Hasil SKM Tahun 2019

1. Terminal Sungai Kunjang memiliki nilai : 79.93
2. Terminal Lempake memiliki nilai : 79.30
3. Terminal Bontang memiliki nilai : 79.18
4. Terminal Sangatta memiliki nilai : 79.12
5. Terminal Tenggarong memiliki nilai : 78.91
6. Terminal Paser memiliki nilai : 79.15
7. Terminal Berau memiliki nilai : 78.97

Jika secara keseluruhan dirata-ratakan maka Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Terminal Tipe B) memiliki Nilai **79.22 dengan kategori Baik.**

Dari tabel dan capaian SKM diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2017 masyarakat di Kalimantan Timur melalui tim penyusun dan penilai Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Kaltim dapat diketahui bahwa pelayanan infrastruktur perhubungan dinilai sangat baik karena mencapai target kerja yaitu 72 sedangkan untuk Tahun 2019 Dinas Perhubungan Prov kaltim menggunakan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi masing-masing 140 orang dan sampel 103 orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut diolah data yang sehingga mendapatkan nilai 79,22% (B).

• **Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Persentase Pergerakan sarana Transportasi**

1. Upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima pada sektor transportasi diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.
2. Peningkatan kualitas atau pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna sarana transportasi pada terminal, pelabuhan, dermaga, dan bandar udara (WC Umum yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum)
3. Melakukan pengintegrasian antar stake holder perhubungan terkait dengan monitoring pergerakan Sarana Transportasi secara berkala sebagai upaya monitoring dan evaluasi dalam salah satu upaya meningkatkan ekonomi Kaltim.

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1
(Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksebilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman)

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Penanggung Jawab | Ket |
|----|---|---|--|------------------|--------------------------|----------------------|----------|--|------|
| 1 | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | | Jumlah dan Kapasitas Prasarana Perhubungan Laut dan SDP | % | 83 % | 97,16 % | 117,06 % | Kabid Pelayaran | APBD |
| | | Pembinaan, pembangunan dan peningkatan pelabuhan | Jumlah dan Progres Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas yang dibangun | Unit dan Dokumen | 2 Unit (%) dan 5 Dokumen | 1 Unit dan 5 Dokumen | 97.16 % | Seksi Kepelabuhanan | APBD |
| | | Pembinaan penyelenggaraan SDP dan pelayaran rakyat | Persentase Sarana dan prasarana angkutan perairan yang memenuhi standar kelaikan | % | 80% | 100% | 125% | Seksi SDP dan Pelayaran Rakyat | APBD |
| | | Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran Rakyat | Jumlah badan usaha angkutan pelayaran yang dibina | Badan Usaha | 100 | 100 | 100% | Seksi Badan Usaha dan Angkutan Pelayaran | APBD |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Penanggung Jawab | Ket |
|----|--|---|--|--------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------|------|
| 2 | Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | Jumlah Simpul Transportasi Yang Terintegrasi dan Terpadu | Simpul | 1 | 1 | 100% | Kabid Pengembangan dan Perkeretaapian | APBD |
| | | Pengembangan prasarana dan fasilitas perkeretaapian | Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan | Lintasan/ Kegiatan | 0 lintasan / 1 Kegiatan | 0 lintasan/ 1 kegiatan | 100% | Kasi Perkeretaapian | APBD |
| | | Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan | Perencanaan | 1 | 1 | 100 % | Kasi Lingkungan Perhubungan | APBD |
| | | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda | Jumlah perencanaan angkutan pemadu moda | Perencanaan | 1 | 1 | 100 % | Kasi Keterpaduan Antar Moda | APBD |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Penanggung Jawab | Ket |
|----|--|--|--|----------|---------|-----------|---------|-----------------------------|------|
| 3 | Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B | | Jumlah Penumpang yang terlayani | Orang | 650.000 | 515.880 | 79.36% | Ka. UPT Terminal | APBD |
| | | Pembangunan dan peningkatan Terminal Tipe B wilayah I | Jumlah terminal Tipe B wilayah I yang dibangun/ditingkatkan | Terminal | 2 | 1 | 50% | Kepala Seksi Operasional I | APBD |
| | | Pembangunan dan peningkatan Terminal Tipe B wilayah II | Jumlah terminal Tipe B wilayah II yang dibangun/ditingkatkan | Terminal | 1 | 1 | 100% | Kepala Seksi Operasional II | APBD |

Sumber: Dinas Perhubungan Kaltim 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 1 Dinas perhubungan memiliki 3 (tiga) Program strategis yaitu sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Prasarana transportasi laut dan ASDP

1. Kegiatan Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan
2. Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat
3. Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran

b. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan :

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda

c. Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B :

1. Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I
2. Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi (Cap.Kin-Peny Angg) |
|----|---|---|-----------------|---------------------|--|
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman | Persentase Pergerakan Sarana Transportasi | 105.1 | 45.58 | 59.52 |

Sumber: Olah data 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 59.52.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Indikator sasaran Strategis 2 (dua):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Realisasi capaian :

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|---|----------------|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%) | Persentase (%) | 50 % | 50.49% | 100.98% |

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2019

Tabel diatas menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis II memiliki realisasi 50.49% dimana hasil tersebut mencapai hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2018-2023.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2017 :

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) Tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2017, 2018 dan 2019

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | % Penurunan/Peningkatan Tahun 2019 |
|-----|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5x100%) |
| 1 | Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%) | % | 45% | 50% | 50.49 % | 0.98% |

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2019

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil capaian sasaran 2 (Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan) jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 0.98.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

Tabel 3.13
Realisasi Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Akhir Renstra

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target Akhir RPJMD/RENSTRA | Realisasi Tahun 2019 | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6=5/4*100 |
| 1 | Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan | % | 85 % | 50.49% | 59.4% |

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2019

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 2 memiliki hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar 59.4%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Sasaran Strategis 2 (Indikator : Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan)

- **Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 2**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 2
(Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat).

1. Hasil Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor / Rampcheck
(Angkutan Orang dan Barang).

Tabel 3.14
Tabel Hasil Rampchek Kendaraan Bermotor Tahun 2019

| Kendaraan Yang Diperiksa | TAHUN | | |
|--------------------------|----------------|------------|-------------|
| | AWAL 2018 | 2019 | Akhir RPJMD |
| Angkutan Umum | 130 | 86 | 250 |
| Angkutan Barang | 136 | 379 | 400 |
| Jumlah | 266 | 465 | 650 |
| Persentase | 71.54 % | | |

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Kaltim Tahun 2019

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang telah dilakukan rampchek (pemeriksaan kelaikan) berjumlah 465 kendaraan, yang terdiri dari angkutan umum dan barang. Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan drastis pada angkutan barang dikarenakan oleh isu strategis dan laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran *over dimensi* dan *over loading*, sehingga perlu adanya tindakan terkait permasalahan tersebut. Diketahui hasil kendaraan yang telah di rampcheck Tahun 2019 berjumlah 465 Kendaraan bila disandingkan dengan target akhir tahun (RPJMD) mendapat persentase sebesar 71.54%.

2. Jumlah Prasarana Keselamatan Jalan yang Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi

Salah satu indikator penunjang keberhasilan capaian sasaran strategis 2 adalah kegiatan pemasangan prasarana keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, adapun jumlah prasarana keselaan jalan yang terpasang pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Prasarana Yang Terpasang Pada Tahun 2019

| Jenis Prasarana | Tahun | | | |
|-------------------|---------------|------|-----------------------------------|-----------------------|
| | Awal 2018 | 2019 | Jml Terpasang Data awal + 2019 | Akhir RPJMD (2023) |
| Rambu | 3025 | 130 | 3155 | 16000 |
| Marka | 201255 | 5630 | 206885 | 2237725 |
| Pagar | 3428 | - | 3428 | 89509 |
| Persentase | 10.58% | | 10.93% | 100% |

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Kaltim Tahun 2019

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa prasarana keselamatan jalan yang terpasang Pada Tahun 2019 untuk rambu berjumlah 130 unit, Marka jalan 5.630 m² sedangkan pagar pengaman tidak terpasang, sehingga jika disandingkan dengan target capaian hasil tahun terakhir RPJMD (Tahun 2023) hanya mencapai 10.93%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2019 target yang telah ditentukan untuk pemasangan prasarana keselamatan jalan sepanjang 120 km², namun hanya terealisasi sepanjang 14.50 m².

3. Prasarana Kelengkapan Terminal Tipe B (Indikator Penilaian WTN)

Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota, salah satu penilaian WTN adalah penilaian terkait dengan prasarana kelengkapan pada Terminal Tipe B yang ada di Kalimantan Timur, adapun penilaiannya pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Angka Penilaian WTN pada Terminal Tipe B

| PRASARANA TERMINAL | TAHUN |
|-----------------------|------------|
| | AWAL 2019 |
| Batu Ampar | 83 |
| Sungai Kunjang | 85 |
| Lempake | 83 |
| Timbau | 77 |
| Penajam | 62 |
| Paser | 58 |
| Bontang | 62 |
| Sangatta | 45 |
| Berau | 68 |
| Persentase | 69% |

Sumber : Bidang LLAJ Dishub Prov. Kaltim 2019

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa angka penilaian Wahana Tata Nugraha khusus pada kelengkapan prasarana terminal memiliki capaian rata-rata 69 %.

4. Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan

Tabel 3.17
Angka Kasus Kecelakaan

| No | Kesatuan | Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018* | 2019* |
| 1 | Polresta Samarinda | 239 | 226 | 133 | 120 | 225 | 170 | 109 |
| 2 | Polres Balikpapan | 322 | 225 | 143 | 140 | 179 | 132 | 88 |
| 3 | Polres Bontang | 35 | 39 | 40 | 38 | 76 | 92 | 55 |
| 4 | Polres Kukar | 156 | 211 | 146 | 145 | 296 | 152 | 40 |
| 5 | Polres Kutim | 121 | 52 | 91 | 90 | 59 | 50 | 34 |
| 6 | Polres Kubar | 32 | 25 | 33 | 30 | 55 | 48 | 103 |
| 7 | Polres Berau | 119 | 114 | 48 | 46 | 85 | 100 | 27 |
| 8 | Polres Paser | 107 | 89 | 59 | 56 | 149 | 80 | 71 |
| 9 | Polres PPU | 82 | 60 | 43 | 40 | 69 | 44 | 43 |
| | JUMLAH | 1.213 | 1.041 | 736 | 705 | 1.193 | 868 | 570 |

Sumber : Data Polda Kaltim 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) Tahun terakhir

• **Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan**

1. Mengkaji kembali jumlah kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi dan lokasi rawan kecelakaan sesuai dengan kebutuhan, guna mengurangi angka kecelakaan lalulintas.
2. Meningkatkan kembali kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum dan angkutan barang secara rutin dan berjenjang, guna mengurangi tingkat pelanggaran over dimensi dan overloading dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten.
3. Peningkatan nilai capaian Wahana Tata Nugraha melalui :
 - a) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan nilai capaian WTN
 - b) mengkaji kembali kebutuhan sarana prasarana kelaikan transportasi darat

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 2
(Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat)

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Penanggung Jawab | Ket |
|----|---|---|---|-------------|--------|-----------|----------|------------------------|------|
| 1 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | | Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas | Kasus | 683 | 511 | 133,65 % | Kepala Bidang LLAJ | APBD |
| | | Pengendalian Fasilitas Pengamanan lalu Lintas Jalan | Panjang Jalan yang dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan | Km | 14.50 | 14.50 | 100 % | Kasi Lalu Lintas Jalan | APBD |
| | | Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan | Jumlah Badan Usaha Angkutan | Badan Usaha | 24 | 24 | 100% | Kasi Angkutan Jalan | APBD |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-------|-------|---------------------------------------|------|
| | | | Umum yang dibina (Badan Usaha) | | | | | | |
| | | Pembinaan dan Pengendalian Keelamatan Sarana dan Prasarana Jalan | Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi | % | 42.50 | 42.50 | 100 % | Kasi Keselamatan Sarana dan Prasarana | APBD |

Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 2 Dinas perhubungan memiliki 1 (satu) Program strategis yaitu sebagai berikut :

d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan :

1. Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan
2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi (Cap.Kin -Peny Angg) |
|----|--|---|-----------------|---------------------|--|
| 1 | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan | 100.98 | 88.98 | 12 |

Sumber: Olah data Dinas Perhubungan 2019

3.4. Capaian Tujuan Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2019

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Indikator Tujuan | Realisasi Tahun 2019 |
|-----|---|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah | Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton) | 10.392.536 Orang dan 344.850.000 Ton | 10.721.656 Orang dan 341.529.897 Ton |

Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2019

Dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan pada RPJMD Tahun 2018-2023 di Tahun 2019 telah melebihi target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategi Dinas Perhubungan Prov Kaltim.

Tabel 3.21
Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Tipe B

| Tahun | Anggaran Belanja | Realisasi | Persentase | Total APBD | | Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan | | Total Program / Kegiatan | | Ket. |
|-------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|---|----------|--------------------------|----------|------|
| | | | | BL | BTL | Program | Kegiatan | Program | Kegiatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2018 | Rp.145.348.921.000 | Rp.130.075.953.492 | 89.49 % | Rp.130.276.373.000 | Rp. 15.072.548.000 | 8 | 14 | 8 | 14 | APBD |
| 2019 | Rp. 59.459.735.500 | Rp.23.707.137.724 | 53.98 % | Rp.43.913.836.500 | Rp. 15.545.899.000 | 8 | 18 | 8 | 18 | APBD |

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Penggunaan Anggaran Tahun 2018 memiliki nilai penyerapan sebesar 89.49% sedangkan tahun 2019 penyerapan realisasi anggaran sebesar 53.98%.

Tabel 3.22
Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Kinerja | | | Anggaran | | |
|-------------------------------|---|---------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman | 30 | 31.5 | 105.1 | 27.274.526.500,00 | 8.345.469.828,15 | 30.60 |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat | 50 | 50.49 | 100.98 | 5.198.724.000,00 | 4.624.644.961,00 | 88.96 |
| Jumlah | | | | | 32.473.250.500,00 | 12.970.114.789,15 | 119.56 |
| Total Belanja Langsung | | | | | Rp. 43.913.836.500,00 | Rp.23.707.137.724 | 53.98 % |

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

| No | Program/kegiatan | Anggaran | | | Keterangan |
|----|--|----------------|---------------|------|------------|
| | | Target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.894.520.000 | 2.739.363.967 | 95% | APBD |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.331.190.000 | 2.317.632.154 | 99% | APBD |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah | 2.476.400.000 | 3.497.222.813 | 141% | APBD |
| 4 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah | 710.832.000 | 705.082.650 | 99% | APBD |
| 5 | Programn Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 4.375.614.000 | 4.032.994.438 | 92% | APBD |
| 6 | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | 3.037.846.500 | 2.498.922.280 | 82% | APBD |
| 7 | Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 21.109.320.000 | 4.829.829.048 | 23% | APBD |
| 8 | Pogram Pembangunan dan Pengembangan terminal Tipe B (UPTD Terminal) | 3.217.350.000 | 1.016.718.500 | 32% | APBD |
| 9 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD Terminal) | 1.075.964.000 | 937.108.401 | 87% | APBD |
| 10 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (UPTD | 413.200.000 | 405.759.350 | 98% | APBD |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| | Terminal) | | | | |
| 11 | Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah (UPTD Terminal) | 138.200.000 | 134.853.600 | 98% | APBD |
| Jumlah | | 41.780.436.500 | 23.115.487.201 | 55% | |
| Total Belanja Langsung | | 43.913.836.500 | 23.115.487.201 | 53% | |

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Prov Katim 2019

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran RPJMD Tahun 2018-203 yang telah disusun dalam Dokumen LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun pertama (2019) memiliki hasil capaian sebagai berikut :

1. Pada sasaran strategis 1 (Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Akseibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman) dengan indikator kinerja “Persentase Pergerakan Sarana Transportasi” memiliki target sebesar 30% dan memiliki realisasi capaian kerja 31,55% sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 105.1%.
2. Pada sasaran strategis 2 (Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat) dengan indikator kinerja “Pertumbuhan Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan” memiliki target sebesar 50% dan memiliki realisasi capaian kerja 50.49% sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 100.98%.
3. Capaian Indikator Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton) dan memiliki 10.721.656 Orang dan 341.529.897 Ton.

4.2. Saran

Dari Analisis Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun Anggaran Tahun 2019, diperlukan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel dan bermanfaat diperlukan komitmen pimpinan terhadap sinergitas antara rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat terukur dengan baik.
2. Perlu adanya evaluasi secara berjenjang terkait dengan capaian-capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Prov Kaltim pada Tahun berjalan untuk menunjang capaian RPJMD baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.
3. Untuk mendapatkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya peningkatan kerjasama antara stakeholder yang terkait dalam mendapatkan data yang akan disusun pada dokumen p laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.